



Jogja-KP Harus Lebih Baik

Jadikan NYIA Etalase DIJ

JOGJA - Hari ini (22/5) lembaran sejarah baru terbuka untuk Kota Jogja dan Kabupaten Kulonprogo (KP). Haryadi Suyuti dan Heroe Poerwadi (HS-IHP) resmi dilantik sebagai wali kota dan wakil wali kota Jogja. Sedangkan Hasto Wardoyo dan Sutedjo menjadi bupati dan wakil bupati Kulonprogo. Sesuai rencana,

pelantikan dilakukan Gubernur DIJ Hamengku Buwono X di kompleks Kepatihan.

Pengamat ekonomi dan kebijakan publik Universitas Muhammadiyah Yogyakarta (UMY) Ahmad Makruf mengingatkan banyaknya tugas berat yang menjadi pertaruhan bagi para terlanik. "Saatnya masyarakat menagih janji. Masalah kemiskinan dan ketimpangan sosial harus cepat diselesaikan," ujarnya.

► Baca *Jogja-KP...* Hal 19



SIAP DILANTIK: Dari kiri Heroe Poerwadi, Haryadi Suyuti, Hasto Wardoyo, dan Sutedjo di sela geladi resik pelantikan kepala daerah di Bangsal Kepatihan kemarin (21/5).

■ JOGJA-KP...

Sambungan dari hal 1

Harapan besar demi terwujudnya masyarakat lebih sejahtera terpikul di pundak dua pasangan kepala daerah tersebut. Terlebih, Kota Jogja masih menjadi tujuan utama wisatawan. Sedangkan Kulonprogo bakal menjadi etalase sekaligus pintu gerbang DIJ. Dengan segera hadirnya New Yogyakarta International Airport (NYIA). Penataan wilayah perkotaan yang kian serewut harus jadi perhatian. Menurut Makruf, slogan "Jogja Berhati Nyaman" dirasa semakin memudar. Beberapa kasus kekerasan jalanan dan konflik sosial pun harus ditekan. Komunikasi ke semua golongan wajib dilakukan para terlanik. Termasuk warga yang tak memilih mereka saat pemilu lalu.

Perizinan usaha hotel, apartemen, dan toko berpijagam jadi persoalan lain yang membutuhkan pemikiran dan kebijakan serius Pemkot Jogja. Sebab, regulasi yang ada belum sepenuhnya mampu mewadahi para pemilik kepentingan. Hal itulah yang memicu terjadinya banyak pelanggaran izin. Bukan tidak mungkin kondisi tersebut akan merembet ke Kulonprogo. Kehadiran NYIA akan membuka ruang investasi seluas-luasnya di Bumi Binangun. Hal itu akan memancing para investor hadir dan membangun infrastruktur modern di Kulonprogo. Untuk itu, Makruf menilai perlunya regulasi baru yang visioner, sebagai konsekuensi kehadiran NYIA. Itu bisa dimulai dengan Peraturan Daerah Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW). Sebab, efek domino NYIA bakal semakin luas. Apa-

lagi pemerintah pusat berencana membangun tol penghubung kawasan wisata di Kulonprogo dan Borobudur, Kabupaten Magelang. Karena itu, Pemkab Kulonprogo setidaknya harus memikirkan konsep pembangunan jangka panjang untuk 50-100 tahun ke depan. Termasuk regulasi untuk Aero City, perdagangan, dan lainnya. Kalau tidak disiapkan dari sekarang warga Kulonprogo tidak akan bisa menikmati bandara baru karena hanya jadi penonton," ingatnya. Pernyataan Makruf merujuk hasil studinya di beberapa daerah yang memiliki bandara, namun masyarakatnya tak merasakan manfaat karena pemerintah setempat telat menyiapkan regulasinya. Makruf merasakan nuansa ini di Kulonprogo. Dalam konteks persiapan, menurutnya, Kabupaten Purworejo justru

lebih cepat tanggap. "Pemkab Purworejo sudah menyiapkan aturan untuk kawasan industri, sedangkan Kulonprogo malah belum," sebutnya. Guna mengantisipasi pelanggaran, Makruf mendorong pemerintah membuka komunikasi kepada masyarakat secara masif dan transparan terhadap akses informasi. Hal itu penting. Guna menghindari terjadinya konflik horizontal, sebagaimana kerap terjadi di Kota Jogja. "Jangan sampai terlambat seperti kota. Mau memperlebar jalan saja susah," sindirnya. Mengenal penanganan kemiskinan, Makruf usul kepada Hasto-Tedjo agar mengembangkan investasi di wilayah utara yang secara geografis berupa pegunungan. Sebab, sebagai kabupaten termiskin ke dua di DIJ lebih berpusat di Kulonprogo sisi utara.

"Yang di selatan itu bakal ada NYIA. Tinggal diperkuat regulasinya. Tapi untuk program ekonomi produktif lebih baik difokuskan ke utara," sarannya. Tata kelola pemerintahan juga harus menjadi perhatian para pemangku daerah. Pengamat pemerintahan Universitas Gadjah Mada (UGM) Bambang Purwoko menilai, selain soal kebudayaan dan pendidikan, Kota Jogja sering menjadi rujukan daerah lain dalam pembangunan serta inovasi pelayanan publik dan pemerintahan. Namun, seiring berjalannya waktu pamor itu mulai meredup. "Jogja harus bangkit, kembalilah garah masyarakat untuk mewujudkan visi sebagai kota pendidikan dan pariwisata yang berbudaya," ucapnya. Bambang mengakui, mewujudkan visi pemerintah bukan langkah mudah. Banyak tantangan yang harus dihadapi. Hal terpentingnya, merancang desain pembangunan yang sinergis dan terkoneksi dengan kabupaten di sekitar Jogja. "Ini penting untuk mengatasi persoalan wilayah yang tidak mungkin diselesaikan sendiri tanpa koordinasi. Misalnya, kemacetan lalu lintas, banjir, sampah, tata lingkungan, dan kenaikan tempa yang kian merebakkan masyarakat," kata dia. Nah, guna merealisasikan desain tersebut, Bambang menilai petiunya pembangunan kawasan Jogja Raya, meliputi wilayah pusat perkotaan dan kecamatan yang berbatasan langsung dengan kabupaten tetangga (pra/ta/yog/ga)

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1.	Netral	Segera	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 18 Agustus 2026
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005